

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara geologis berada pada pertemuan tiga besar lempeng tektonik yaitu, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pertemuan tiga lempeng besar tersebut menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Indonesia secara geografis berada di daerah tropis dan pertemuan antara dua samudera dan dua benua memiliki ancaman bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2021).

Bencana disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam serta faktor manusia yang kemudian menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terjadi ketika kerjasama terstruktur antara ancaman dengan kerentanan serta didorong oleh unsur lain sehingga potensi ancaman bencana yang terpendam timbul sebagai ancaman nyata (Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2012).

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2021 memiliki indeks risiko bencana tingkat sedang dengan nilai indeks risiko bencana sebesar 60.43 pada tahun 2021. Dilihat dari letak geografisnya wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di dataran rendah dengan rata-rata ketinggiannya adalah 8 meter di atas permukaan laut dan dialiri 13 sungai yang bermuara di Laut Jawa. Selain itu, Jakarta memiliki masalah yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, 40% wilayah berada di bawah permukaan laut, rawan gempa bumi, serta dilintasi beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Jakarta memiliki ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem/abrasi (BNPB, 2021).

Bencana dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Namun dampak dari bencana dapat diminimalisir dengan merubah kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

Perubahan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengetahuan tentang kebencanaan. Jika masyarakat memiliki pengetahuan bencana baik, maka dampak bencana dapat diminimalisir. Dalam hal ini, sektor pendidikan memiliki fungsi vital dalam upaya penanggulangan bencana (Hafida, 2018). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.

Sekolah merupakan salah satu tempat dimana masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana. Namun, berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 54.080 sekolah berada di wilayah rawan banjir. Bencana banjir di sekolah bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa baik peserta didik dan tenaga pendidik, terhentinya proses belajar mengajar, rusaknya sarana dan prasarana sekolah dan hilangnya dokumen sekolah. Idealnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dan guru (Ramadhani et al., 2020). Kerugian bencana yang menimpa elemen sekolah seperti guru, peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana mengakibatkan masa depan generasi muda terancam (Lesmana & Purborini, 2019). Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menurunkan risiko bencana serta melindungi anak maupun warga sekolah ketika berada di sekolah melalui sekolah aman bencana (Anisah & Sumarni, 2019).

Sekolah aman bencana adalah salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana (Nopembri et al., 2021). Satu dekade lebih program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan sudah dilakukan di Indonesia. Berbagai istilah digunakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintahan. Meskipun memiliki istilah yang berbeda, tujuan dari program tetap sama yaitu menyelamatkan nyawa warga sekolah khususnya anak-anak dari bencana yang akan datang. Istilah-istilah tersebut yaitu, PRBBS (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah), SSB atau Sekolah Siaga Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sekolah Madrasah Aman Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (Amri et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2012 sekolah aman bencana diartikan sebagai sekolah yang menggunakan standar sarana, prasarana, dan budaya yang dapat melindungi warga sekolah serta lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir (SMAB) di Provinsi DKI Jakarta dimuat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir dimana di dalamnya memuat usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga sekolah dari ancaman dan dampak bencana. Dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 disebutkan bahwa fokus penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana yaitu banjir, kebakaran, gempa bumi, dan angin topan, serta disesuaikan dengan kondisi bencana yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir memuat tiga pilar kerangka kerja sekolah aman bencana yaitu, fasilitas sekolah yang aman, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pada penerapannya, dibutuhkan peran seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk menguatkan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi tangguh bencana (Sakti & Widana, 2020). Pendidikan mengenai keamanan di sekolah (*safety education*) dapat membekali seluruh warga sekolah terutama siswa terhadap bencana yang dapat terjadi kapan saja (Ariani, 2021). Oleh karena itu, pendidikan keamanan di sekolah diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap warga sekolah menjadi tangguh dalam menghadapi bencana.

Menurut Sunarto (dalam Hayudityas, 2020) faktor disekitar anak-anak menjadikan mereka rentan terhadap bencana, karena ketidaksiapan mereka menghadapi bencana berasal dari faktor di sekitar mereka. Dwi (dalam Anisah & Sumarni, 2019) menyatakan “Edukasi di sekolah tidak cukup hanya dengan memasukkan kurikulum berbasis penanggulangan bencana, tetapi juga harus menciptakan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa dan pengajar ketika terjadi bencana alam sebab bencana tidak dapat diprediksi. Untuk itu, salah satu hal yang terpenting adalah menciptakan sekolah aman dan nyaman”. Konsep dasar

Sekolah Aman Bencana sendiri adalah berpusat pada anak, karena anak-anak mempunyai kebutuhan khusus saat menghadapi bencana (Amri et al., 2017).

SD Islam Assa'adah merupakan salah satu sekolah yang terdampak dan bersinggungan langsung pada bencana banjir. Sekolah ini, terletak di Kelurahan Bidaracina, Jakarta Timur dan berada di Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Pada tahun 2017 SD Islam Assa'adah mendapatkan pendampingan tentang Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik atas inisiatif pihak sekolah karena menyadari bahwa lokasi sekolah berada pada daerah rawan bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi di SD Islam Assa'adah adalah banjir. Banjir pada tahun 2007 dan 2012 yang melanda Jakarta mengakibatkan berhentinya kegiatan belajar dan mengajar di SD Islam Assa'adah.

Dengan melihat kondisi tersebut maka pihak SD Islam Assa'adah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi program Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Setelah adanya pelatihan dan sosialisasi diharapkan SD Islam Assa'adah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bencana serta dapat meningkatkan pengetahuan warga sekolah tentang penanggulangan bencana di sekolah. Implementasi sekolah aman bencana memiliki tujuan untuk menanamkan kesiapsiagaan warga sekolah untuk pengurangan risiko bencana yang dapat terjadi sehingga dapat menciptakan sekolah aman bagi peserta didik, tenaga pendidik, serta warga sekolah lainnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi program Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di SD Islam Assa'adah sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan pendampingan program Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di DKI Jakarta.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir Di SD Islam Assa'adah, Bidara Cina, Jakarta Timur.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang disebutkan maka fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di SD Islam Assa'adah, Bidara Cina, Jakarta Timur.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di SD Islam Assa'adah, Kelurahan Bidaracina berkaitan dengan tujuan sekolah aman bencana untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari risiko bencana.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi lain yang melakukan penelitian mengenai implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di DKI Jakarta berkaitan dengan usaha pengurangan risiko bencana di sekolah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan saran untuk pihak-pihak pelaksana Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah lainnya di DKI Jakarta.

### **F. Kerangka Konseptual**

#### **1. Implementasi**

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, dalam proses penyelesaiannya.

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi didasarkan pada aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu susunan, implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi rangkaian kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Gordon implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Pasolong, 2007). Inti dari implementasi adalah kegiatan pendistribusian produk kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai usaha untuk merealisasikan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 1991).

Jones (1994) berpendapat bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan program. Menurut Agustiono (2006), implementasi adalah suatu tahap yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut Syukur (dalam Hasbullah, 2015) terdapat tiga indikator dalam implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi target dan diharapkan akan menerima manfaat, perubahan, atau peningkatan dari program;
- 3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dan proses implementor.

## **2. Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir(SMAB)**

### **a. Definisi Sekolah**

Sekolah adalah susunan interaksi sosial yang terdiri atas interaksi pribadi terkait dalam suatu hubungan organik (Wayne dalam buku Atmodiwirio, 2000:37). Sementara itu, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik (Daryanto, 1997).

Dari definisi tersebut, sekolah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya (Pidarta, 1997). Berdasarkan beberapa teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang berada di masyarakat dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

#### **b. Definisi Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana adalah hambatan serius pada fungsi sebuah komunitas yang melampaui kapasitasnya untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Bencana disebabkan oleh faktor alam, manusia, dan kegagalan teknologi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi paparan dan kerentanan suatu masyarakat (IFRC, 2014).

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) bencana adalah gangguan berat terhadap masyarakat yang menyebabkan kerugian eksternal dan dirasakan baik masyarakat, berbagai materi dan lingkungan (alam) dengan efek yang ditimbulkan diluar kemampuan manusia dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) bencana adalah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respons dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas (Usiono et al., 2018).

## **Jenis-Jenis Bencana**

### a) Bencana alam

Bencana alam merupakan gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan dari proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan, struktur dan ekonomi masyarakat, serta menimbulkan kemalangan.

### b) Bencana akibat ulah manusia

Bencana akibat ulah manusia adalah peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antar manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap hidup masyarakat.

### c) Bencana kombinasi

Bencana kombinasi disebabkan karena ulah manusia dan oleh alam.

Solehudin (2005) mengelompokkan bencana menjadi dua jenis, yaitu bencana alam yaitu fenomena alam seperti banjir, genangan air, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya. Bencana ulah manusia yaitu kejadian yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, gangguan listrik, gangguan transportasi, dan lainnya.

## **c. Sekolah/Madrasah Aman Bencana**

Sekolah Aman, Sekolah Aman Bencana, dan Sekolah Tangguh digunakan untuk rangkaian kegiatan sekolah yang berkesinambungan dan dibentuk secara menyeluruh (struktural maupun non-struktural) melalui pemenuhan fasilitas keselamatan dan pengurangan risiko bencana, membangun dan menjalankan manajemen sekolah aman, dan penyebarluasan informasi Pengurangan Risiko Bencana dan tindakan keselamatan (Lasmana, 2019).

Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir diatur dalam Pergub DKI Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir dan Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Sekolah aman dibagi menjadi tiga definisi, yaitu:

- a) Pengertian umum: sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, Kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat;
- b) Pengertian definisi khusus: sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana;
- c) Pengertian terkait Pengurangan Risiko Bencana: sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.

Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak atas perlindungan, keamanan dan kelangsungan hidup dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan kerjasama berbagai pihak dan bersifat multi-sektor. Dalam Roadmap Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir oleh Kemendikbud (2015).

Prinsip pokok pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir adalah berbasis pengurangan risiko bencana, inklusif, ramah anak, pemanduan ke dalam kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. selain itu, tujuan strategis pelaksanaannya terdiri dari perlindungan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang aman terhadap bencana; kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana; dan penguatan ketangguhan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana melalui pendidikan.

Komunitas sekolah – baik peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah – memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga harapan bahwa komunitas sekolah menjadi panutan dalam melakukan pencegahan bencana menjadi tinggi. Keberhasilan mitigasi bencana merupakan

salah satu ujian utama terhadap keberhasilan pendidikan yang diberikan dari generasi ke generasi.

Nilai-nilai dalam pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir mempertimbangkan perubahan budaya, berorientasi pemberdayaan, kemandirian, pendekatan berbasis hak, keberlanjutan, kearifan lokal, kemitraan, dan inklusivitas. Pelaksanaan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Sekolah/Madrasah selaku pendukung pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di DKI Jakarta.

Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir dilaksanakan dengan mengoordinir sepuluh indikator di Daerah yang terdiri atas (1) Ditetapkannya peta ancaman bencana sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah. (2) Ditetapkannya prosedur tetap penanggulangan acaman bencana sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah. (3) Ditetapkannya rencana aksi sekolah aman bencana oleh Kepala Sekolah/Madrasah. (4) Ditetapkannya tim siaga bencana di sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah. (5) Tersedia dan diajarkannya modul penanggulangan bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan bagi siswa sekolah/madrasah. (6) Tersedianya tenaga pengajar yang berkemampuan membimbing dan membina pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan di lingkungan sekolah/madrasah. (7) Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), pelampung, tali tambang, rambu kebencanaan, alat pertolongan pertama, megaphone/sirine. (8) Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana di sekolah/madrasah minimal 1 (satu) kali dalam setahun. (9) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan sekolah/madrasah aman bencana. (10) Disosialisasikannya Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di lingkungan sekolah oleh manajemen sekolah.

## **G. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan pada penelitian ini pertama ditulis oleh Nisfi Anisah dengan judul “Model Sekolah Aman Bencana Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter Di MIN 1 Bantul” menggunakan metode deskriptif kualitatif menghasilkan pembentukan sekolah aman bencana di MIN 1 Bantul dilatarbelakangi oleh gempa tahun 2006. Bencana gempa yang terjadi menyadarkan MIN 1 Bantul akan pentingnya pendidikan keamanan bagi warga madrasah. Model sekolah aman bencana di MIN 1 Bantul berupa sekolah siaga bencana. Program sekolah siaga bencana dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kerangka struktural dan non struktural sekolah aman meliputi 3 pilar sekolah aman bencana yaitu fasilitas sekolah aman, manajemen bencana, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Keterkaitan program sekolah aman bencana dalam pendidikan karakter di MIN 1 Bantul dilaksanakan melalui pembiasaan guna menanamkan nilai karakter yang mencerminkan budaya sekolah aman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar.

Berdasarkan penelitian relevan kedua yang ditulis oleh Rizkia Mutiara Ramadhani, Fitri Andrianti Indah Gustaman, Muhammad Sarip Kodar, dan IDK Kerta Widanaha dengan judul “Implementasi Program Sekolah Aman Bencana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan Kalimantan Timur” menggunakan metode kualitatif deskriptif menghasilkan implementasi Sekolah Aman Bencana di SMKN 4 Balikpapan terlaksana dengan cukup baik. Ditandai dengan tingkat kesiapsiagaan warga sekolah SMKN 4 Balikpapan cukup baik dalam menghadapi bencana melalui pengukuran menggunakan indikator kesiapsiagaan sekolah. Tingginya tingkat kesiapsiagaan yang dimiliki oleh warga sekolah SMKN 4 Balikpapan didukung oleh adanya pengetahuan dan keterampilan warga sekolah dalam menghadapi bencana. Selain itu, diperlukan pula dukungan yang berdifat teknis seperti penyediaan sarana serta prasarana yang mampu mendukung kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi ancaman bahaya setempat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar.

Berdasarkan penelitian relevan ketiga yang ditulis oleh Sri Kartika Sakti dan I Dewa Ketut Kerta Widana dengan judul “Analisis Implementasi Program Sekolah Aman Bencana (SAB) Di Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor” menggunakan metode deskriptif kualitatif menghasilkan presdiklat Sekolah Aman Bencana (SAB) di SDN Gunung Geulis 02 tidak menjamin bahwa SDN Gunung Geulis 02 aman karena masih banyak memiliki kekurangan untuk layak disebut sebagai Sekolah Aman Bencana. Faktor terbesar yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi syarat untuk menjadi SAB karena faktor keamanan dan keselamatannya serta tata letak benda belum memperhatikan sesuai syarat untuk menjadi SAB. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya SAB yang benar-benar memenuhi syarat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar.

Berdasarkan penelitian relevan keempat yang ditulis oleh Gilang Isa Baskara dengan judul “Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana Pada SMK Nasional Berbah Sleman” menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif menghasilkan potensi bencana paling tinggi yang dimiliki di SMK Nasional Berbah Nasional adalah gempa bumi. Selain itu, erupsi gunung merapi dan banjir lahar dingin, puting beliung, kebakaran, dan kecelakaan kerja. Secara keseluruhan dalam implementasi program sekolah siaga bencana SMK Nasional Berbah Sleman memiliki rata-rata sebesar 91,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program sekolah siaga bencana di SMK Nasional Berbah telah berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian relevan kelima yang ditulis oleh Fika Ariani dengan judul “Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Di SMA Negeri 8 Mataram” menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan satuan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan satuan pendidikan yang aman terhadap bencana bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Pelaksanaan

manajemen bencana yang dilakukan untuk memastikan terlaksananya hal-hak belajar siswa sebagaimana mestinya, meskipun pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan manajemen bencana di SMA Negeri 8 Mataram telah memenuhi dan memperhatikan manajemen risiko bencana dan manajemen kedaruratan khususnya pada masa pandemi. Manajemen bencana dilakukan dengan beberapa tahapan seperti penentuan prosedur tetap dan pembentukan tim siaga bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan manajemen bencana ini belum dilakukan oleh semua satuan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar.

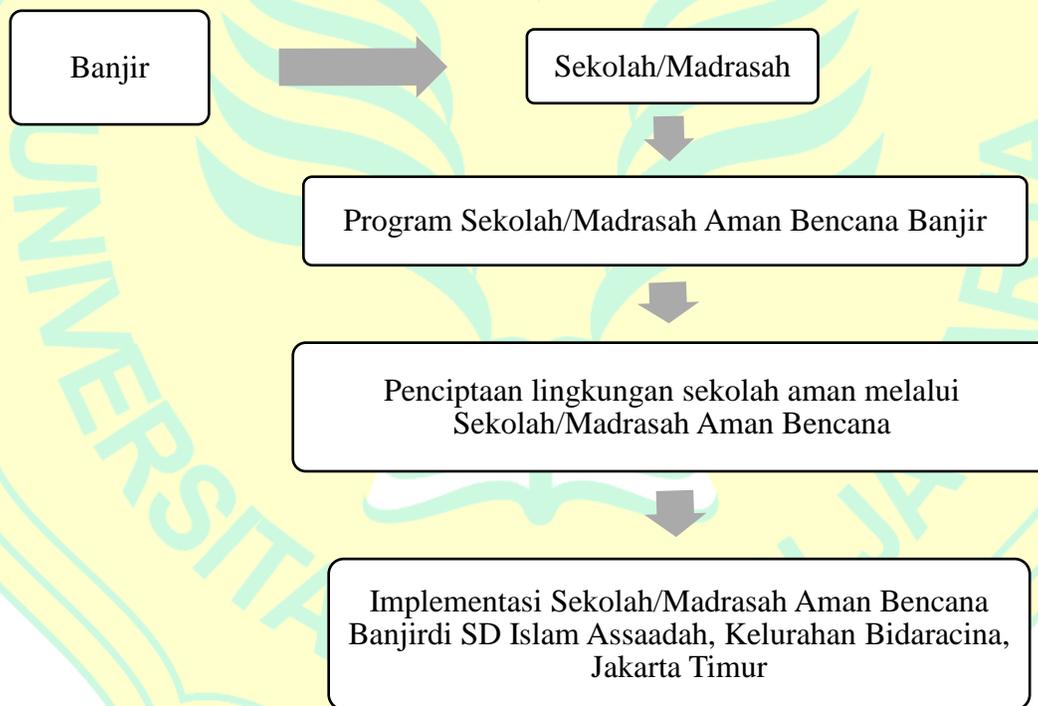
Berdasarkan penelitian relevan kelima yang ditulis oleh Muhammad Rizal Pahleviannur, Siti Hadiyati Nur Hafida dengan judul “Penentuan Prioritas Pilar Sekolah Aman Bencana dalam Mendukung Realisasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMA Negeri 1 Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah” menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus menghasilkan pengelolaan SPAB di SMA Negeri 1 Karangdowo terhadap pilar fasilitas sekolah aman memprioritaskan kepada ketinggian yang aman dari banjir, struktur bangunan stabil dan kokoh, perbaikan kerusakan, ruangan dengan pintu terbuka ke luar, kualiti kontrol, dan penguatan bangunan. Strategi manajemen SPAB perlu meningkatkan kapasitas fasilitas sekolah dengan meningkatkan kapasitas pada pilar yang tidak diprioritaskan untuk mewujudkan manajemen SPAB yang komprehensif berdasarkan tujuan inti fasilitas sekolah aman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di sekolah dasar.

#### **H. Kerangka Berfikir**

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Kejadian bencana yang tidak terduga kejadiannya menimbulkan dampak pada bidang pendidikan, seperti rusaknya fasilitas sekolah, terganggunya proses belajar mengajar dan timbulnya korban pada warga sekolah. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Salah satunya adalah dengan membuat program Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program ini

bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah terhadap bencana dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bencana.

Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir di DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016. Melalui pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana Banjir diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bencana serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Berikut merupakan kerangka berpikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian**